

PERAN PROGRAM SRAWUNG PRAJA RRI SURAKARTA

**(Studi Deskriptif Kualitatif Peran Program Srawung Praja
Sebagai Media Komunikasi Politik
Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Masyarakat)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar Sarjana S-1



Disusun Oleh :

NICK PUMA BHELA HARYOKO

NIM. L100060030

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era kebebasan pers yang marak dewasa ini membuat media massa saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat. Pers orde baru yang selalu menyampaikan keseragaman isi media mengakibatkan terjadinya kesamaan cara berfikir masyarakat. Era reformasi memungkinkan adanya kebebasan baik dalam penyampaian informasi lewat media ataupun untuk mendirikan sebuah institusi media. Era reformasi yang diikuti oleh kebijakan deregulasi dalam bidang media dan liberalisasi dalam informasi melalui jaminan kemerdekaan pers dan kebebasan informasi menempatkan masyarakat Indonesia dalam bentara informasi.

Akses mayoritas masyarakat Indonesia pada medium informasi sangat terbatas (khususnya media cetak), mengakibatkan berkembangnya kesenjangan informasi (information gap) antara mereka yang umumnya disebut sebagai the media rich dengan the media poor. Bahkan propaganda pembangunan yang berlebihan seringkali menjenuhkan masyarakat. Informasi yang bersifat top down berkesan menggurui seolah-olah kota lebih pintar dari masyarakat pinggiran dan masyarakat desa (Balairung : 2008:51). Itulah sebabnya ruang-ruang publik di kampung-kampung pinggiran ataupun di desa-desa dari arisan, kumpulan warga seperti kelompok tani, rembug kampung atau dukuh, gardu jaga hingga kedai sayur menjadi lalu lintas informasi masyarakat pinggiran dan di desa. Saat ini

masyarakat juga dihadapkan pada percepatan informasi dimana ruang-ruang publik yang ada sudah tidak dapat menampung ataupun mewadahi. Karena itulah perlu adanya media lain yang mampu mengalirkan pemerataan informasi sampai ke daerah-daerah pedesaan. Seperti banyaknya persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kota Surakarta, yang wilayahnya tersebar di 51 kelurahan.

Berdasarkan hasil dari catatan Badan Pusat Statistik di Kota Surakarta mencakup wilayah yang cukup luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan lebih dari 65% penduduk tinggal di daerah pinggiran kota, sebagian besar masyarakat kota Surakarta sulit mengakses informasi dari pihak pemerintah kota Surakarta, hal ini yang menyebabkan macetnya komunikasi antara warga masyarakat kota Surakarta dengan Elit Pemerintahan. Kemacetan informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat semakin parah dengan ketidakberdayaan warga untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dari kelompok masyarakat terutama masalah-masalah yang berkembang ditengah-tengah kehidupan.

Belum lagi komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kota Surakarta banyak menggunakan komunikasi satu arah, atau hanya sebatas penyampaian pesan dari satu pihak yaitu pemerintah kota Surakarta, tanpa adanya Feed back (umpan balik) atau respon balik dari masyarakat. Hal ini jelas kurang mampu mengatasi macetnya arus aspirasi dari kalangan masyarakat. Hal inilah pulalah yang menjadi dasar pemikiran dari pihak pemerintah Kota Surakarta dan beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap pentingnya

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan berusaha membuka akses informasi dan aspirasi yang selama ini tersendat.

Tetapi perlu juga diingat bahwa kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat kota Surakarta untuk mengakses informasi masih menjadi salah satu alasan mengapa media massa masih dianggap mahal. Masyarakat yang tingkat ekonominya rendah lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok daripada sekedar untuk membeli koran, misalnya. Akibatnya media massa hanya menjadi konsumsi para elit tertentu saja. Apalagi bila budaya dan kemampuan baca masyarakat terutama di pinggiran masih rendah, karena media massa cetak masih sulit diakses oleh mayoritas warga masyarakat.

Dengan melihat besarnya jumlah penduduk dan pemerataan penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pinggiran kota dengan tingkat ekonomi termasuk kelas menengah kebawah (pra-sejahtera), maka pihak pemerintah kota Surakarta memandang perlu adanya program yang bisa mengatasi permasalahan seperti telah disebutkan diatas yaitu macetnya akses informasi dan aspirasi masyarakat tersebut. Tentunya hal yang tak kalah penting adalah program tersebut disajikan melalui sebuah media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang sebagian besar berkemampuan ekonomi yang rendah.

Program yang dimaksud adalah program komunikasi yang bersifat terbuka, artinya program tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemerintahan. Dalam hal ini Walikota selaku Kepala Daerah, sehingga masyarakatpun dapat secara

langsung menyampaikan aspirasi mereka, sehingga apa yang dinamakan transparansi (keterbukaan) jalannya pemerintahan dapat terwujud.

Perencanaan komunikasi yang dituangkan dalam program sebuah media yang telah disebutkan tadi, tentunya perlu diperhatikan pula pemilihan media yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat kota Surakarta dengan wilayah geografis yang luas dan padat penduduknya itu. Disinilah sebenarnya peran radio dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi, namun tidak memiliki cukup dana untuk mengaksesnya.

Radio dipandang sebagai satu-satunya media paling strategis guna menjangkau audience yang menempati ruang geografis yang luas. Masyarakatpun lebih dapat mendengarkan radio karena sebagian besar masyarakat memilikinya, baik di daerah perkotaan ataupun wilayah pinggiran kota bahkan sampai ke wilayah pedesaan. Radio masih menjadi alat komunikasi yang fleksibel, orang bisa mendengarkan berita radio dengan santai bahkan sambil tiduran ataupun sambil mengerjakan sesuatu di rumah atau dilokasi manapun.

Dalam hal ini, masyarakat Kota Surakarta merasa memiliki kepentingan yaitu merasa penting memiliki informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Kepentingan yang disampaikan oleh pihak pemerintah kota ini merupakan kebijakan yang sifatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, apabila ada kebijakan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, maka masyarakatpun perlu merespon. Setelah kebijakan disampaikan melalui media massa, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

Program acara radio yang dimaksud dapat hadir di tengah-tengah masyarakat secara rutin dan sifatnya mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para pejabat pemerintahan, khususnya pemerintah kota Surakarta, atau dengan kata lain mampu menjembatani komunikasi dua arah, Sehingga upaya untuk mewujudkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat terwujud. Harapan masyarakat mengenai transparansi public dapat terwujud.

Pemerintah kota Surakarta dalam mensosialisasikan program-programnya atau masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan dapat diakses melalui siaran radio. Dalam hal ini Radio Republik Indonesia stasiun Surakarta (RRI Surakarta), pasca reformasi lebih menekankan sebagai lembaga siaran public yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau media komunikasi antar pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat. Program Siaran Srawung Praja RRI Surakarta, sebagai media komunikasi antara pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat untuk berkomunikasi program-program pembangunan, nampaknya memiliki eksistensi yang kuat dalam memenuhi fungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah kota Surakarta dengan warga kota Surakarta. Dalam program siaran srawung praja itu, tidak harus walikota sebagai nara sumber, tetapi juga kepala-kepala bagian atau lembaga pemerintah untuk menyampaikan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Program srawung praja ini, selain dipakai untuk menyampaikan informasi dan sebagai media komunikasi antar pemerintah dan masyarakat secara langsung, juga dipakai untuk mencapai legitimasi pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : "Bagaimana peran program siaran srawung praja sebagai komunikasi politik antara pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Komunikasi Politik yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta melalui Media Siaran Srawung Praja RRI Surakarta dengan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah komunikasi yang dilakukan pada suatu pemerintah daerah atau pemerintah kota melalui media siaran dengan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khasanah studi dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan komunikasi yang dikembangkan lembaga pemerintah.
3. Bagi penulis penelitian ini akan menambah wawasan baru berkaitan dengan aplikasi dan teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia dan Komunikasi Politik yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta melalui Media Siaran Radio.